

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
DAN BARANG**



**Oleh:**

**Edi Wibowo, ST., M.M  
Titin Maidarti, SE., M.M  
Inti Nuswandari, SE., M.M**

**PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN  
UNIVERSITAS IPWIJA JAKARTA  
2022**

## PENGESAHAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK

---

1. Judul Penelitian	: PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG
---------------------	--

---

2. Jenis Penelitian	: Kelompok
---------------------	------------

---

3. Ketua Kelompok	
a. Nama lengkap dengan gelar	: Edi Wibowo, ST., MM
b. Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.1-III/b
c. Program Studi	: Manajemen
d. NIDN	: 0307027801

---

4. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
------------------------	------------------

---

5. Lokasi Penelitian	: Jakarta
----------------------	-----------

---

6. Jangka Waktu Penelitian	: 6 (Enam) bulan
----------------------------	------------------

---

7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
--------------------------	--------------------------------------

---

Jakarta, Desember 2022

Ketua Tim Penelitian



**Edi Wibowo, ST., MM**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Manajemen  
Universitas IPWIJA Jakarta,



**Dr. Susanti Widhiastuti, MM**

Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian  
Pada Masyarakat Universitas IPWIJA



**Rochmad Fadjar D., SE, MM**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kelancaran dalam menyusun laporan singkat hasil penelitian kelompok yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG” sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Program Studi Manajemen Universitas IPWIJA Jakarta, Dr. Susanti Widhiastuti, MM dan juga Rochmad Fadjar D., SE, MM. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas IPWIJA Jakarta yang telah memberikan ijin dan membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Terakhir peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sumbangsih kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan demi perbaikan laporan penelitian ini. Meskipun banyak kekurangan didalamnya tetapi kami berharap laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, aamiin.

Jakarta, Desember 2022

Tim Peneliti

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG**

**Oleh:**

**Edi Wibowo, ST., M.M**

**Titin Maidarti, SE., M.M**

**Inti Nuswandari, SE., M.M**

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk menganalisis pengaruh dari penerapan good governance, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas pengelolaan administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Metode yang dipakai adalah kuantitatif dengan menggunakan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah 93 orang pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan, dan menggunakan teknik total sampling, sampel penelitian ini adalah 93 sampel. Analisis data dengan melakukan uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.

---

**Kata Kunci:** Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Pengelolaan Administrasi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Pengesahan Laporan Hasil Penelitian .....	2
Kata Pengantar .....	3
Abstrak .....	4
Daftar Isi .....	5
Latar Belakang .....	6
Metode Penelitian .....	8
Hasil dan Pembahasan .....	8
- Hasil penelitian .....	9
- Pembahasan .....	10
Penutup .....	12
- Simpulan .....	12
- Saran .....	12
Daftar Pustaka .....	13

## **I. LATAR BELAKANG**

Pelayanan administrasi masih menjadi masalah di Indonesia yang membutuhkan perhatian dan solusi yang luas. Secara kualitatif, dengan mudah dapat ditunjukkan di mana-mana bahwa tuntutan yang berbeda terhadap pelayanan public dilihat sebagai tanda dari ketidakpuasan masyarakat sehari-hari. Harus diakui, dalam pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat terus diperbarui seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan dalam pemerintahan, baik dari segi paradigam maupun bentuk pelayanannya (Mangkunegara, 2011).

Tertib administrasi merupakan konsep dari pengembangan pelayanan bagi penyelenggara bidang administrasi agar pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif. Selama ini, pelayanan administrasi public terkesan lambat dan tidak efisien karena kurangnya koordinasi dan desentralisasi tugas yang jelas. Pelayanan dinilai baik adalah pelayanan yang hasilnya sesuai dengan harapan. Orang akan menyampaikan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang efisien serta efektif. Masalah yang timbul dalam pelayanan dan disebabkan oleh individu / agen layanan dan yang dilayani, contohnya komunikasi yang tidak jelas. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zamzami & Gowon, 2021).

Pelayanan administrasi masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah (baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah), untuk menyelenggarakan kegiatan berbasis kepentingan umum atau sosial. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public akan terpenuhi hanya apabila pegawai memberikan apa yang diharapkan selama ini, pelayanan ini memiliki tiga unsure utama yaitu biaya relative murah, jam kerja yang relatif juga cepat dan kualitasnya relatif yang baik (Barus, 2010).

Kualitas kerja Pelaporan Keuangan Kegiatan dan pelaporan informasi keuangan harus memenuhi juga kebutuhan pengguna, sedangkan 'karakteristik kualitatif dari informasi data keuangan harus cukup dan pengungkapan yang adil berdasarkan keamanan orang pemilik (Yadiati, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 01 tentang Standar Akuntansi Negara bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif. Empat karakteristik berikut merupakan asumsi normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu: relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan Matriks table sandingan indicator kinerja kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan sebelum serta sesudah penyesuaian (Tullah, Apriyanti, & Wijaya, 2018).

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan sebelum dan sesudah penyesuaian**

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketepatan waktu Penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja	100%	100%	100%
2	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95%	71%	75%
3	Persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) $\geq 80$	60%	90%	150%
4	Persentase nilai barang milik negara (BMN) yang telah mendapatkan surat keputusan penetapan status penggunaan (SKPSP) sesuai ketentuan	100%	36%	36%

Terlihat dari data di atas, beberapa indicator mengalami penurunan, dan masih digunakannya pembukuan dalam pengelolaan keuangan, sehingga pencarian data menjadi lama. Penyajian kembali pengelolaan keuangan membutuhkan waktu yang lama karena masih tercatat dalam buku besar sehingga mengakibatkan proses penyajian kembali tidak terorganisasi dengan baik.

Kesulitan mengumpulkan data keuangan yang disimpan dalam buku yang berbeda (Siahaya, Asnawi, & Allo Layuk, 2018).

Transaksi tatap muka terbatas, sehingga pencarian dokumen/koreksi yang mewakili data-data dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan menghadirkan sejumlah hambatan pengungkapan ketidaksesuaian. Masih terdapat permasalahan kualitas penyajian data di LK yang terkait dengan Rekon & LK, seperti kesalahan penggunaan rekening pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai aturan merupakan cita-cita juga harapan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dari good governance di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1. Peraturan No. 32, tahun 2004 tentang pelaksanaan peraturan daerah sendiri. Menginformasikan kepada public tentang kinerja aparat pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk cara mengurangi asimetri informasi di-sektor publik. Menurut Robinson (Harun, Baderan, & Paramata, 2019), mengukur kepentingan sector public mencakup tiga ukuran, yaitu: a). Sebagai fasilitas tempat pembelajaran yang ditingkatkan layanannya, b). sebagai pembelajaran untuk meningkatkan praktik manajemen, serta c). Sebagai media pelaporan akuntabilitas juga transparansi.

Pemerintahan yang dinilai baik secara konseptual, mempunyai pengertian dari kata baik atau good dalam istilah ke-pemerintahan baik yang juga memiliki makna bahwa good governance berarti mengandung dua pemahaman: Kesatu, nilai yang menjunjung tinggi kemauan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang bisa meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional bagi kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, dari aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya demi mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2017).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sari (2017) “Good Government Governance yaitu: menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid, dan bertanggung-jawab, efisien dan

juga efektif, dengan menjaga factor kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain negara, sector swasta dan juga masyarakat.”

Selain itu, laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.

Menurut Spencer (Zai, Purba, & Nainggolan, 2020), kompetensi merupakan dasar dari karakteristik pribadi yang berkaitan dengan hasil yang dicapai di tempat kerja. Menurut Werther dan Davis (Sutrisno, 2012), sumberdaya manusia adalah karyawan yang siap, pandai, dan cermat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut (Mangkunegara, 2011), kompetensi sumberdaya manusia adalah kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifat kepribadian yang mempengaruhi kinerjanya secara langsung.

Kinerja pegawai Kementerian Keuangan dan Biro Barang Milik Negara merupakan salah satu komponen aparatur negara yang masih kurang optimal. Hal ini terungkap dengan adanya pegawai yang tidak memenuhi criteria analisis jabatan. Hambatan bagi karyawan adalah kurangnya kemandirian, kepercayaan diri dan motivasi diri, serta seringkali tidak mampu melepaskan pola pikir terstruktur, yaitu melakukan aktivitas berdasarkan instruksi dari atasan atau uraian tugas yang terstruktur. Karena kreativitas sangat menentukan pemikiran dan gagasan yang dikembangkan karyawan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih judul ini. Dan berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Good governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe asosiatif kuantitatif. Menurut Silalahi (2015), penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah sistematis tentang hal kausalitas bagian-bagian yang sistematis dan fenomena beserta hubungannya. Penelitian kuantitatif ini tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori dan atau hipotesis yang dapat berkaitan dengan fenomena alam.

Sedangkan menurut (Sujarweni, 2015), “metode asosiatif yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih”. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu: 93 pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI. Pengambilan teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling. Dengan menggunakan teknik total sampling, ditentukan 93 orang pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI. Alasan menggunakan total sampling adalah berdasarkan jumlah populasi yang kurang dari 100, maka besar sampel penelitian ini adalah 93 orang.

Teknik analisa data adalah dengan metode yang menggunakan analisis eksploratif. Penulis menggunakan aplikasi SPSS v.20 untuk analisis data. Sebuah statistik uji yang digunakan:

#### 1. Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memprediksi bagaimana variable dependen (Kualitas Pengelolaan Administrasi) dipengaruhi oleh variable independent. (Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia). Rumus persamaan untuk regresi linier berganda ini adalah:  $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

#### 2. Uji Hipotesis

##### 1. Uji t

Uji t digunakan untuk menilai apakah model variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan dilakukan uji t berganda. (Sugiyono, 2012) Kriteria tujuan:

a. Ho diterima, jika  $t \text{ hitung} \leq t_{\text{tabel}}$  (tidak berpengaruh) dan jika nilai  $\text{sig} > 0,05$ . (tidak signifikan).

b. Ho ditolak, jika  $t \text{ hitung} > t_{\text{tabel}}$  (berpengaruh), dan jika nilai  $\text{sig} \leq 0,05$ , (signifikan).

##### 3. Uji Kelayakan Model

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati berapa nilai signifikansi F pada taraf yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan taraf 5%).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Responden

**Tabel 2 Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin</b>		
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki – laki	38	40.86
Perempuan	55	59.14
Jumlah	93	100

**Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

Lama bekerja	Frekuensi	Persentase
< 3 tahun	3	3.23
3 - 6 Tahun	66	70.97
>6 Tahun	24	25.81
Jumlah	93	100

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2022

Berdasarkan data tersebut, terdapat total 38 pegawai laki-laki atau 40.86%, dan perempuan sebanyak 55 pegawai atau 59.14%. Dapat dikatakan bahwa pada

**Tabel 4. Hasil Analisis Output SPSS**

<b>Uji Hipotesis</b>	<b>t hitung</b>	<b>t table</b>	<b>Ket</b>
Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi	4.718	1.985	Berpengaruh
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi	5.461	1.985	Berpengaruh
Uji Model	f hitung	f table	Ket
Uji F	320.209	2.70	Berpengaruh
Uji Model	R Square	Persentase	Ket
Uji Koefisien Determinasi	0,877	87.7%	Berpengaruh

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2022

## **B. Uji t**

### **a. Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi**

Hasil uji t diketahui, variabel Good Governance (X1) memiliki nilai t numeric sebesar 4.718 dan nilai table sebesar 1.985 untuk  $n = 93$ . Jadi  $4.718 > 1.985$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat dinyatakan bahwa: Good Governance memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi (Nuraini, Kirmizi, 2019).

### **b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) tidak signifikan sebesar 5.461, dan nilai tabel  $n=65$  adalah 1.985, jadi  $5.461 > 1.985$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.

## **C. Uji Model**

Dari hasil statistic diatas, yaitu: uji ANOVA dapat diperoleh nilai F-hitung sebesar 320.209, sedangkan F-tabel (0,05) dengan  $N=93$  sebesar 2.70. Jadi  $F\text{-hitung} > \text{F-tabel}$  (0,05) atau  $320.209 > 2.70$ , maka dapat dikatakan bahwa Good Governance (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi (Y) secara bersamaan.

Menurut table diatas, mengembangkan model gabungan dengan nilai R-kuadrat 0,877 berarti bahwa Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi 87.7% Kualitas Pengelolaan Administrasi, sedangkan 12.3% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dipelajari oleh studi penulis ini (Mardiasmo, 2009).

## **D. Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya Good Government Governance berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini dikarenakan organisasi menerapkan 5 prinsip yang dalam menjalankan good governance yaitu: demokrasi, transparan, akuntabilitas, budaya hukum, serta terdapat kewajaran dan kesetaraan. Pedoman ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan good government governance agar pemerintahan

bisa berjalan dengan baik, juga kualitas pengelolaan administrasi dapat berjalan dengan baik (Barus, 2010).

Pelaksanaan program agenda Manajemen Publik Baru diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan serta efisiensi pelayanan dan organisasi pelayanan public dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang mengedepankan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2017) (Rachmawati, Susanto, & Yusuf, 2015) menyatakan bahwa good governance memiliki peran untuk mewujudkan informasi data keuangan yang baik dan berkualitas.

#### **E. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh atas Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki pegawai sudah baik, dan telah memiliki kemampuan berpikir yang bisa mendukung dalam penyelesaian setiap tugas-tugasnya dengan baik, sehingga kualitas pengelolaan administrasi dapat berjalan dengan baik (Bandung, n.d.).

Kemampuan sumber daya manusia adalah bentuk deskripsi karakteristik ilmu pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki orang untuk melakukan pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Kompetensi dan kualitas seorang PNS mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Oleh karenanya, kapabilitas sumberdaya manusia dapat dikatakan sebagai kapabilitas seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan Rima Apriliani, Salasiah, 'Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan, serta secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (Anggie Rizka, Zamzami, 2021).

#### **IV. PENUTUP**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan diatas, Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini merupakan bentuk prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat adalah pembuatan Laporan keuangan pemerintah yang merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan prinsip good governance. Tuntutan masyarakat luas yang besar terhadap proses akuntabilitas pemerintah, mengeluarkan implikasi bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, dan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi tersebut. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Dalam hal ini seorang Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, skill/keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, sehingga seorang PNS mampu melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional. Saran bagi penelitian ini adalah pimpinan organisasi sebaiknya dapat mengadakan evaluasi yang rutin terhadap penerapan dan pelaksanaan good governance agar semua pegawai memiliki rasa tanggungjawab terhadap sistem tata kelola organisasi pemerintahan sehingga dapat tumbuh berkembang sesuai dengan standar pelayanan publik. Bagi Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI hendaknya menyadari akan pentingnya penerapan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Konsisten dalam menerapkan konsep good governance dan terus berupaya memperbaiki setiap kekurangan didalam setiap pelayanan publik/masyarakat.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggie Rizka, Zamzami, Muhammad Gowon. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.
- Bandung, Kinerja Pegawai P. T. Bank Jabar. (n.d.). AA. Anwar Prabu Mangkunegara.(2014). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit

- Aswaja Pressindo. Afandi, P.(2014). Manajemen Sumber Daya Manu.
- Barus, Sedia Willing. (2010). *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*.
- Harun, Isra, Baderan, Umar Sako, & Paramata, Sri Hantuti. (2019). PERANAN KELEMBAGAAN POSDAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TOLITE JAYA KECAMATAN TOLINGGULA KABUPATEN GORONTALO UTARA. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 2(2), 95–102.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2011). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Nuraini, Kirmizi, Kamaliah. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Provinsi Riau). *Pekbis Jurnal*. 11 (3S - tak cocok dengan artikel manapun).
- Rachmawati, Yunaita, Susanto, Dwi, & Yusuf, Dian Anggraeni. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(02), 116060.
- Sari, A. Anditha. (2017). *Dasar-dasar public relations teori dan praktik*. Deepublish.
- Sedarmayanti, S. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. *Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama*.
- Siahaya, Erwin, Asnawi, Meinarni, & Allo Layuk, Paulus K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1), 276645.
- Sugiyono, Memahami. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*.
- Sutrisno, Adi Sutrisno. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmas cakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Tullah, Dewi Sarifah, Apriyanti, Erma, & Wijaya, Nanang. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di

- Jawa Barat Dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1).
- Yadiati, Winwin. (2019). The role of green intellectual capital and organizational reputation in influencing environmental performance. *670216917*.
- Zai, Ferra Pratiwi, Purba, Sahala, & Nainggolan, Arison. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 5(1), 1–10.
- Zamzami, Zamzami, & Gowon, Muhammad. (2021). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING:(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 136–148.